

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
VAKSIN COVID-19
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAKHRUL RAZI

NIM. 160801054

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fakhrul Razi**
NIM : 160801054
Program Studi : Ilmu Politik
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Yang menyatakan,



Fakhrul Razi
NIM. 160801054

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN VAKSIN

(Studi Kasus: Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

FAKHRUL RAZI

NIM. 160801054

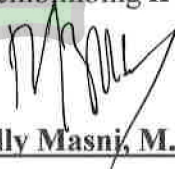
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si


Melly Masni, M.I.R

NIP.196610231994021001

NIP. 199305242020122016

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Fakhrul Razi
NIM.160801054


Pada Hari / Tanggal
Rabu : 18 Januari 2022
16 Jumadil Akhir 1443

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001


Sekretaris


Melly Magni, M.I.R
NIP.199305242020122016


Penguji I


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

Penguji II


Ramzi Murziqin, MA
NIP. 198605132019031006

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Kebijakan vaksinasi dari pemerintah untuk masyarakat mendapatkan pro-kontra dari banyak kalangan. Pemerintah menganggap vaksinasi adalah untuk mencegah terjangkitnya wabah virus corona yang saat ini sedang melanda dunia. Realita di lapangan menunjukkan, tidak sedikit mereka yang telah divaksin juga terkena virus corona. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan vaksinasi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan vaksinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni suatu metode penelitian karya ilmiah yang mengutamakan data melalui wawancara dengan para responden. Pengumpulan data diperoleh melalui metode dokumentasi, wawancara dan sumber data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh maupun karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Banda Aceh mengenai kebijakan vaksinasi dan mengetahui faktornya bagi masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi di Kota Banda Aceh ada tiga. *Pertama* masyarakat kontra (anti) vaksinasi yang menilai vaksinasi merupakan bencana bagi mereka. *Kedua*, kelompok pro (setuju) menilai kebijakan vaksinasi merupakan bentuk ikhtiar untuk mencegah terjangkitnya virus corona dan membentuk imun tubuh. *Ketiga*, kelompok Skeptisme menilai kebijakan vaksinasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi manfaat dan mudaratnya (positif dan negatif). Sisi manfaatnya bahwa pemerintah harus objektif mengenai data korban dan kemampuan vaksinasi. Kelompok ini juga meminta masyarakat agar tidak juga menafikan informasi mengenai vaksinasi yang dikemukakan oleh para ahlinya yang bukan bagian pemerintah. Kelompok abu-abu bersedia divaksin karena terpaksa.

Kata kunci: *Persepsi, Masyarakat, Kebijakan, dan Vaksinasi.*



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya *shalawat* beriring salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih turut pula penulis ucapkan kepada Ibu Melly Masni, M.IR selaku pembimbing II yang telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Politik dan selaku penasehat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr.Muslim Zainuddin, M.Si dosen pembimbing I dan Ibu Melly Masni, M.IR selaku pembimbing II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk membimbing hingga selesainya skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Ramzi Murziqin, M.A selaku penasehat akademik peneliti yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada peneliti.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
8. Teristimewa sekali penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan, dorongan, serta doa siang-malam, sehingga saya mampu menjadi pribadi seperti saat ini. Terimakasih banyak juga kepada keluarga-keluarga saya lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
9. Terimakasih kepada teman-teman saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu Afdhal, Azharun, Devin dan teman-teman lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta doa untuk saya.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan baik. Peneliti berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah swt selalu melindungi mereka serta membalas kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan dalam penulisan ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Banda Aceh, 10 Januari 2022
Penulis,

Fakhrul Razi
NIM. 1160801054



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Persepsi Masyarakat	14
2.2.2 Kebijakan Publik	20
2.2.3. Kebijakan Vaksin	21
2.2.4 Pemerintah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Pendekatan Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian	25
3.3 Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.4.1 Wawancara	27
3.4.2 Observasi	28
3.4.3 Dokumentasi	28
3.5 Teknik Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
4.1. Profil Kota Banda Aceh	31
4.2. Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Kebijakan Vaksinasi	35
4.2.1. Kelompok Pro Vaksin	37
4.2.2. Kelompok Anti Vaksin	40
4.2.3. Kelompok Skeptisme	45
4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Kebijakan Vaksinasi	49
4.3.1. Latar belakang budaya masyarakat	51
4.3.2. Pengalaman masa lalu	52
4.3.3. Nilai-nilai yang dianut	53
4.3.4. Berita-berita yang berkembang	53

BAB V PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus corona merupakan salah satu jenis virus yang mematikan di dunia. Virus ini sudah menyebar lebih dari 50 negara. Awalnya virus ini berasal dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar begitu cepat hingga sampai ke Indonesia. Selain tergolong wabah yang berbahaya, virus corona sangat cepat menular.¹ Salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka melakukan penanganan penyebaran covid-19 di Indonesia yaitu dengan melakukan vaksinasi. Virus corona atau lebih populer dengan *Corona Virus Deseas* (Covid 19) masuk ke Indonesia pertama kali diperkirakan pada bulan Januari 2020, tetapi baru resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020.² Sampai 18 Agustus 2021 jumlah kasus covid di Indonesia mencapai 3.892.479 juta kasus, 121.141 meninggal dunia. Sementara di tingkat dunia mencapai 212 juta kasus, 4,43 juta meninggal dunia.³ Untuk Provinsi Aceh hingga tanggal 22 Agustus 2021 mencapai 30.077 orang terkena covid. Menurut data Pemerintah Aceh, jumlah kasus corona yang terkonfirmasi mencapai 38353 kasus, 2060 orang di antaranya meninggal dunia. Untuk Kota Banda Aceh yang terkonfirmasi mencapai 1205 orang, meninggal dunia berjumlah 343 orang. Sedangkan yang sedang dalam

¹ Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan", *Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020*, hal. 4.

² <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>. Lihat juga: <https://www.kompas.com/sains/image/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=1>, diakses tanggal 13 Juli 2021.

³ <https://www.tribunnews.com/corona/2021/08/18/breaking-news-update-corona-18-agustus-2021-pasien-positif-tambah-15768-total-3908247>, diakses tanggal 23 Agustus 2021.

perawatan mencapai 26 orang.⁴ Pemerintah Pusat menargetkan masyarakat yang akan divaksin sekitar 181 juta jiwa dari jumlah populasi keseluruhan di 34 provinsi, yaitu 271 juta jiwa.⁵

Untuk mencegah masifnya virus corona, pemerintah terus mencari berbagai terobosan, salah satunya adalah melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa, tujuan dari pelaksanaan vaksinasi adalah untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Ahli Virus sekaligus Dirut RS Unair, Prof Dr. dr. Nasronudin S.pPD K-PTI FINASIM menjelaskan manfaat dari vaksin Covid-19, yaitu untuk merangsang sel tubuh manusia dan bisa mencegah virus masuk. Lebih jauh ditegaskan, "Vaksin itu tujuannya memberikan kekebalan pada individu yang mendapatkan vaksin. Suntikan vaksin itu diharapkan akan menginduksi atau merangsang sel tubuh manusia. Terutama sel B untuk memproduksi imunoglobulin. Sehingga individu memiliki kekebalan pada SARS-CoV-2. Kalau ada SARS-CoV-2 masuk bisa ditanggulangi dengan kekebalan tubuh manusia. Kalau toh terinfeksi tidak berat, cukup ringan."⁶ Tujuan lain adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid 19. Target masyarakat yang akan divaksin sekitar 181,5 juta jiwa dari 34 provinsi atau sekitar 70% dari penduduk Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Aceh, dari 5,6 juta penduduk, ditargetkan sekitar 70 persen atau 3,7 juta orang yang akan divaksin.⁷

⁴ <https://covid19.acehprov.go.id/>, diakses pada tanggal 5 November 2021.

⁵ Harian Serambi Indonesia, Edisi 23 Agustus 2021, hal. 3.

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5240431/manfaat-vaksin-covid-19-hingga-efek-sampingnya-menurut-ahli-virus>. Lihat juga: <https://www.kemkes.go.id/article/view/21022200001/bappenas-gelar-vaksinasi-covid-19-tahap-pertama-bagi-500-pegawai.html>. Lihat juga: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5240431/manfaat-vaksin-covid-19-hingga-efek-sampingnya-menurut-ahli-virus>, diakses tanggal 16 Juli 2021.

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/7656-persen-warga-di-banda-aceh-telah-divaksinasi-covid-19.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani menyatakan, sampai 30 Oktober 2021, warga Banda Aceh yang sudah divaksin mencapai 81,3 persen atau sebanyak 190.289 orang. Vaksinasi Dosis I telah dilakukan sebanyak 154.692 orang, atau sekitar 81,3 persen, dan 106.766 di antaranya sudah melakukan vaksinasi Dosis II atau 56,1 persen.⁸

Rencana kegiatan vaksinasi tersebut haruslah mempertimbangkan segala aspek, mulai dari aspek kelayakan vaksin yang akan digunakan, resiko pasca pemakaian, sampai tahapan dan prosedur dari pemberian vaksin hingga nantinya sampai ke masyarakat. Semua aspek tersebut haruslah dipertimbangkan secara terperinci agar rencana kegiatan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rencana kegiatan vaksinasi tersebut juga haruslah mempertimbangkan berbagai persoalan di antaranya adalah dengan melihat bagaimana respon dan opini masyarakat terhadap wacana vaksinasi tersebut.

Di Indonesia vaksin masuk pada 6 Desember 2020. Sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu vaksin tersebut langsung dibawa ke Kantor Pusat Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya pemerintah sudah menetapkan enam vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk dipakai di Indonesia,⁹ yaitu vaksin buatan Bio Farma, Sinovac, Pfizer, Sinopharm, Moderna, dan AstraZeneca. Vaksin corona pertama yang masuk ke Indonesia merupakan

⁸ <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/10/30/1033/vaksinasi-covid-19-warga-banda-aceh-tembus-80-persen.html>, diakses pada tanggal 5 November 2021.

⁹ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5285492/vaksin-corona-sudah-sampai-di-indonesia-ini-asal-negara-dan-tingkat-keampuhannya>, diakses pada 14 Juni 2021.

buatan Sinovac Biotech. Perusahaan Sinovac BioTech adalah farmasi China yang mengembangkan vaksin Covid-19 bernama CoronaVac.¹⁰

Selama dua dekade terakhir, Sinovac telah mengembangkan dan menjual enam vaksin yang digunakan manusia dan satu vaksin hewan, di antaranya adalah vaksin hepatitis A dan B, influenza H5N1 (flu burung), influenza H1N1 (flu babi), vaksin gondok, dan vaksin rabies anjing. Sinovac juga telah mencapai banyak tonggak pengembangan signifikan termasuk mengembangkan vaksin H1N1 pertama di dunia pada tahun 2009. Uji klinis vaksin Corona Sinovac dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Kala itu uji klinis vaksin Covid-19 ini sempat dihentikan sementara di Brasil karena adanya isu terkait masalah keamanan, misalnya setelah uji klinis vaksin Covid-19 CoronaVac buatan Sinovac Biotech setelah ada kasus relawan meninggal.¹¹ Namun, kendatipun demikian, kejadian tersebut dipastikan tidak berkaitan dengan vaksin Covid-19. Hingga kini, uji klinis vaksin Corona Sinovac di Indonesia sudah sampai pada penyampaian *data interim report* uji klinis fase III ke BPOM dan dinyatakan aman. Beberapa waktu lalu, laporan uji klinis vaksin Corona Sinovac juga memicu respons imun empat pekan usai suntik.

Pada tanggal 1 Januari 2021, Pemerintah Indonesia sudah mendatangkan 3 juta dosis vaksin Sinovac dari China. Kemudian, gelombang kedua dengan jumlah 1,8 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 1 Januari 2021. Paket vaksin ini dibawa ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER dari maskapai Garuda

¹⁰ <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/17/161437370/vaksin-sinovac-dan-kisah-dibalikny?page=all>, diakses pada 19 Januari 2022.

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2020111121155-37-200990/brasil-setop-uji-vaksin-corona-sinovac-ahli-bukan-hal-aneh>, diakses pada 14 Juni 2021.

Indonesia.¹² Direktur Utama Bio Farma Indonesia, Basyir mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma sedang melakukan upaya menyiapkan ketersediaan dan beragam pasokan vaksin Covid-19 dari perusahaan-perusahaan yang disetujui oleh pemerintah.¹³

Untuk Kota Banda Aceh, vaksin mulai masuk tanggal 5 Januari 2021 sebanyak 14.000 dosis vaksin jenis Sinovac. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, dr. Iman Murahman menjelaskan delapan box yang berisi 14 ribu dosis vaksin tersebut akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan medis yang tersebar di seluruh Aceh. Obat vaksin untuk Kota Banda Aceh disimpan di gudang Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Aceh, Geuceu Kayee Jato, Banda Aceh. Ia menyebutkan bahwa untuk tahap awal, Aceh dijatahkan sebanyak 27.880 dosis vaksin. Namun, untuk sementara baru menerima setengahnya.¹⁴

Secara umum di Kota Banda Aceh sendiri vaksinasi covid-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan, TNI, Polri, masyarakat rentan, geospasial, sosial dan ekonomi, dan pelaku ekonomi serta masyarakat lainnya. Sementara untuk tahap awal ini, vaksinasi dikhususkan bagi para tenaga kesehatan dan beberapa pejabat terutama pemerintah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan DPRK.¹⁵

¹² <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses tanggal 17 Juni 2021.

¹³ <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses tanggal 17 Juni 2021.

¹⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses tanggal 17 Juni 2021.

¹⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses tanggal 17 Juni 2021.

Terkait vaksinasi, pada awalnya umat Islam bingung terkait kehalalan dan keamanan vaksinasi tersebut, tetapi setelah keluar fatwa MUI Pusat, sebagian sikap umat umat Islam skeptis, antara mempercayai atau tidak mengenai kebenaran kehalalan yang dikeluarkan MUI tersebut. Demikian juga dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh sudah mengaminkan fatwa MUI pusat tersebut. Kendati demikian, sampai sekarang masih muncul ketidakpercayaan oleh sebagian masyarakat Aceh terutama di Banda Aceh menyangkut kehalalannya. Masyarakat membutuhkan fatwa dari MPU Aceh, bukan hanya sekedar membenarkan fatwa MUI Pusat. Fatwa menurut Nur Khaera adalah jawaban yang cocok untuk menjawab persoalan umat.¹⁶

Di satu sisi, di lembaga MPU Aceh belum ada pakar dalam bidang kesehatan terutama menyangkut vaksin. Lembaga fatwa ini bukan hanya tempat berkumpul para ulama dalam bidang agama *an sich* akan tetapi mereka terdiri berbagai multi-disiplin ilmu.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Muslim yang memiliki tanggung jawab untuk membina, membimbing umat Islam di seluruh Indonesia. Tugas lain dari MUI adalah membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan sebuah produk makanan, penentuan kebenaran aliran dalam Islam dengan lingkungannya. Di samping

¹⁶ Nur Khaera, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan *Maslahat Mursalah*)," *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 2019, hal. 1.

¹⁷ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Yogyakarta, 2015), hal. 113.

fungsinya tersebut, MUI merupakan pengawas dan melakukan kontrol terhadap peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh pihak pemerintah.¹⁸

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Ajakan persuasif dan sosialisasi lebih dikedepankan. Vaksinasi terhadap warga terutama di Kota Banda Aceh dimulai pada tanggal 15 Januari 2021. Yang menjadi prioritas awal vaksinasi adalah tenaga medis, pejabat struktural dan dilanjutkan TNI-Polri. Namun, di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak bersedia divaksin disebabkan oleh berbagai faktor. Masyarakat Kota Banda Aceh bingung dengan kebijakan vaksin ini, karena di berbagai daerah mereka yang telah divaksin masih tertular virus corona, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat menyangkut kebijakan vaksinasi ini.¹⁹

Salah satu kampus di Banda Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala (USK) membuat kebijakan kewajiban bagi mahasiswa baru untuk melakukan vaksinasi. Wakil Rektor I Prof. Dr. Ir Marwan menjelaskan bahwa kebijakan vaksin bagi mahasiswa baru ini adalah bentuk persiapan USK dalam menghadapi pembelajaran semester baru. Vaksinasi dapat dilakukan di mana saja dan untuk sertifikat yang di-*upload* boleh vaksin yang pertama atau kedua. Ditambahkan, untuk mahasiswa lama juga akan diterapkan hal yang sama.²⁰

¹⁸ M Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 251.

¹⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat Banda Aceh Bapak Muhammad Yusuf Al-Qardhawy tanggal 17 Agustus 2021. Lihat juga:

²⁰ <https://persfe.com/universitas-syiah-kuala-wajibkan-vaksinasi-bagi-seluruh-mahasiswa-baru/#.YSGPHd-yTIU>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

Hal serupa ditegaskan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Aceh untuk melakukan vaksinasi.²¹ Sampai saat ini capaian vaksinasi di Kota Banda Aceh hampir mencapai 77 persen dari target 70 persen, yaitu 37.443 orang dari jumlah penduduk 250 ribu jiwa.²² Sementara data terakhir yang dikeluarkan Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Saifullah Abdulgani menyebutkan Kota Banda Aceh hingga 22 Agustus 2021 masyarakat yang sudah divaksin baru mencapai 54,3 persen yang dimulai sejak 15 Maret 2021. Pemerintah Aceh menargetkan vaksinasi sampai 4.028.891 orang yang tersebar di 23 kabupaten/kota atau sekitar 70 persen penduduk.²³ Data akhir November 2021, vaksinasi di Kota Banda Aceh sudah mencapai 90 persen penduduk.²⁴

Data terakhir per 30 Desember 2021, untuk Kota Banda Aceh sudah berhasil melakukan vaksinasi mencapai 100 persen lebih dari jumlah target. Kendati demikian, dalam realita empirisnya muncul pro-kontra di kalangan masyarakat Banda Aceh mengenai kebijakan vaksinasi tersebut. Munculnya pro-kontra masyarakat itu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena informasi dari media massa yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu sehingga membentuk dan mengubah persepsi masyarakat mengenai vaksinasi.

Berdasarkan uraian di atas, menarik dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Vaksin Covid-19 (Studi Kasus: Kota Banda Aceh).”**

²¹ <https://pengairan.acehprov.go.id/kategori/pemerintah>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

²² <https://aceh.inews.id/berita/capaian-vaksinasi-di-banda-aceh-7656-persen-total-37443-orang>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

²³ Harian Serambi Indonesia, edisi 23 Agustus 2021, hal. 3.

²⁴ Harian Serambi Indonesia, Edisi 6 Desember 2021.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan vaksinasi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan vaksinasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan vaksinasi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan vaksinasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi semua kalangan termasuk akademisi dalam melihat sebuah fenomena vaksinasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan landasan kebijakan bagi masyarakat, akademisi, praktisi, dan semua pihak mengenai kebijakan vaksinasi oleh pemerintah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan maupun dijadikan referensi atau literatur kepada mahasiswa ilmu politik dan masyarakat secara luas.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan informasi kepada mahasiswa ilmu politik untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian. Penelitian tentang ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para penulis dan peneliti sebagai berikut:

Nur Khaera, dengan judul penelitiannya “Persepsi masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum Dan Maslahat Mursalah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella yang merupakan produk dari *Serum Institute of India* (SII), secara langsung memberikan pengaruh serta menimbulkan pro-kontra terhadap masyarakat. 2) Kemaslahatan yang ingin dicapai dari keputusan bolehnya penggunaan vaksin Measles Rubella adalah menjaga jiwa, yang menjadi salah satu dari lima komponen tujuan tercapainya syariat (*ad-daruriyyat al-khams*). MUI mempertimbangkan di mana kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyariatkannya hukum Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya kejelasan hukum mengenai penggunaan vaksin Measles Rubella, sehingga masyarakat tidak ragu dan mempersoalkan kehalalan vaksin tersebut, serta perlunya upaya pemerintah untuk menemukan vaksin yang halal, sehingga tidak ada pro-kontra yang terjadi di masyarakat, selain hal tersebut antara Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia harus bersinergi dalam mensosialisasikan program Imunisasi vaksin

Measles Rubella secara massif, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat yakin dan percaya, dan peningkatan di semua lini dengan memanfaatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Mauliddiyah Ika dengan judul penelitiannya “*Analisis Yuridis Sosiologis tentang Pengawasan Peredaran Vaksin Ditinjau dari Peraturan Peredaran Obat dan Vaksin di RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung oleh Dinkes Kabupaten Tulungagung dan BPOM Jawa Timur*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan peredaran vaksin di RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung oleh Dinkes Kabupaten Tulungagung dan BPOM Jawa Timur dan hambatan dalam pengawasan peredaran vaksin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, pengawasan yang terstruktur, berkelanjutan dan konsisten sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan peredaran vaksin palsu. Pengawasan tersebut juga dilakukan secara preventif dan representatif untuk mencegah beredarnya vaksin palsu di Rumah Sakit khususnya RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung dengan pengawasan berkala, dan pengawasan khusus bekerjasama antara Dinkes Kabupaten Tulungagung dengan BPOM Propinsi Jawa Timur. Sementara, pengawasan dalam pengelolaan sediaan farmasi di RSUD dr. Iskak dilakukan oleh IFRS dengan menggunakan sistem satu pintu. Hambatan yang dialami dalam pengawasandan peredaran vaksin di Rumah Sakit adalah kurangnya tenaga pengawasan atau SDM di Dinkes ataupun Rumah Sakit, dan juga mengenai tata cara pengolahan limbah habis pakai di di RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.²⁵

²⁵ Mauliddiyah, Ika (2017) *Analisis Yuridis Sosiologis tentang Pengawasan Peredaran Vaksin Ditinjau dari Peraturan Peredaran Obat dan Vaksin di RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulung Agung oleh Dinkes Kabupaten Tulungagung dan BPOM Jawa Timur*. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Noviansyah, Kristiani, Fatwa Sari Tetra dewi, dengan judul penelitiannya “Persepsi Masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin” INTISARI: Latar Belakang: Persepsi masyarakat khususnya keluarga miskin terhadap Program Dana Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (PJKMM) mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan. Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi, seperti pendidikan, pengetahuan, pengalaman, motivasi dan sosialisasi.

Hasilnya 56% responden memiliki pengetahuan cukup tentang *managed care* dan 73,3% responden memiliki persepsi netral terhadap PJKMM. Analisis statistik menunjukkan korelasi yang signifikan antara internal faktor (pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi) dan persepsi terhadap PJKMM, dengan hubungan kuat untuk motivasi dan hubungan sedang untuk pengetahuan dan pengalaman. Sosialisasi dengan berbagai sumber dan media informasi sebagai faktor eksternal juga memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi terhadap PJKMM, dengan hubungan sedang. Sementara penelitian kualitatif menunjukkan bahwa PJKMM merupakan dana kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin. Ada yang memandang positif terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas namun juga beberapa memberikan penilaian negatif mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit karena pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas rumah sakit belum optimal. Dari semua variabel, motivasi pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi persepsi terhadap PJKMM.

Kesimpulan: persepsi masyarakat terhadap PJKMM dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dengan motivasi sebagai faktor dominan.²⁶

Menyangkut penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi dari jenis virus corona belum ditemukan penelitiannya, maka oleh karena itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Persepsi Masyarakat

Secara etimologi istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris dari kata *perception*. Awalnya istilah ini diambil dari bahasa Latin, dari kata *perceptio* atau *percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Secara umum pengertian persepsi menurut Jalaluddin Rahmat adalah mengenai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dapat diartikan memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).²⁷

Persepsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.²⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Psikologi seperti dikutip Mohammad Asrori mengartikan persepsi sebagai suatu proses pengamatan seseorang

²⁶ Noviansyah, Kristiani, Fatwa Sari Tetra Dewi, tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin”.

²⁷ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 50.

²⁸ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hal. 880.

terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.²⁹

Menurut Irwanto pengertian persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Reaksi seseorang terhadap suatu objek dapat diwujudkan dalam bentuk sikap atau tingkah laku seseorang tentang apa yang dipersepsikan.³⁰

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.³¹

Sementara itu, masyarakat dalam bahasa Inggris disebut "*society*" asal kata "*socius*" yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab yaitu "*syirk*" yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.³² Sulaiman mengemukakan bahwa masyarakat dalam arti yang lebih khusus adalah kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.³³ Jadi masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili pada suatu wilayah yang terdiri dari berbagai

²⁹ Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: CV. Wacana Prima, 2009), hal. 21.

³⁰ Irwanto, dkk, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal.71

³¹ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggulangan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1/Januari 2015, hal. 121-122.

³² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hal. 157.

³³ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco, t.th), hal. 6

profesi, karakter, bahkan agama, ras, etnis, dan sebagainya dengan batas-batas tertentu.

Pendapat lain menyatakan bahwa istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dari kata *syaraka* atau *musyarak* yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau berkawan. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.³⁴ Menurut Syamsuddin, masyarakat adalah “kesatuan hidup dari manusia-manusia yang terikat oleh satu sistem adat istiadat tertentu”.³⁵ Pendapat lain menjelaskan bahwa masyarakat adalah sebagai kombinasi sistem dan unit sosial yang melakukan fungsi sosial utama sesuai dengan kebutuhan orang-orang pada tingkatan lokal.³⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa persepsi masyarakat adalah penilaian atau respons masyarakat terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Persepsi masyarakat dalam penelitian adalah respons masyarakat (responden) dalam menyimpulkan terkait kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Rahmat Dahlan menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang atau masyarakat, yaitu faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

³⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2004), hal. 23

³⁵ Syamsuddin, *Diklat Antropolog Budaya*, (Banda Aceh, Unsyiah, 1984), hal. 61.

³⁶ F. Ellen Netting, dkk, *Praktek Makro Pekerjaan Sosial*, Bandung: 2001, hal. 18.

- a. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
- b. Pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman. Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
- c. Kepribadian. Di mana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.
- d. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang memengaruhi persepsi.³⁷

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:

- a. Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens.
- b. Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.

³⁷ Rahmat Dahlan, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1/Juni 2017, hal. 109.

- c. Kontras. Secara umum hal-hal yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian.
- d. Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.
- e. Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.
- f. Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.
- g. Sesuatu yang baru. Faktor ini kedengerannya bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.³⁸

Berdasarkan penjelasan Rahmat Dahlan di atas dikaitkan dengan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa suatu persepsi dari masyarakat dapat terjadi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor pertama atau faktor internal seperti latar belakang, pengalaman, kepribadian, sistem nilai, dan penerimaan diri merupakan kebiasaan umum yang terjadi dalam masyarakat dalam menilai suatu fenomena. Latar belakang seperti pendidikan atau pengetahuan agama yang mendalam akan menentukan cara orang tersebut dalam merespons suatu informasi atau fenomena. Mereka akan tidak mudah menerima begitu saja setiap informasi yang beredar dalam masyarakat.

Faktor internal lain mempengaruhi persepsi masyarakat menurut Rahmat Dahlan adalah pengalaman. Pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai yang pernah dialami (djalani, dirasa, ditanggung, dan sebagainya).³⁹ Dalam kasus vaksinasi, ada masyarakat yang tidak setuju (anti) dan setuju sangat erat dengan pengalaman. Masyarakat yang menolak vaksinasi

³⁸ *Ibid.*, 11.

³⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2005), edisi ke-3, hal. 26.

menganggap vaksinasi tidak menjamin orang tidak akan terkena virus corona, bahkan tidak sedikit yang divaksin mengalami kematian dan sakit. Berdasarkan pengalaman ini, maka ada masyarakat yang menolak vaksinasi.

Selanjutnya faktor internal yang mempengaruhi masyarakat adalah kepribadian, sistem nilai, dan penerimaan diri. Kepribadian seseorang sangat menentukan ia dalam merespons setiap fenomena yang ada. Demikian juga dengan sistem nilai dan penerimaan diri (*self-acceptance*). Mengenai sistem nilai, Haryanti Bahar menulis:

“Sistem turut mempengaruhi seseorang untuk berpersepsi, oleh karena itu suatu sistem nilai yang melekat dalam diri seseorang menyebabkan aktivitasnya dipengaruhi oleh sistem tersebut. Nilai-nilai yang tertanam pada seseorang oleh lingkungan yang membentuknya seperti hal hal yang baik ataupun hal hal yang buruk, yang pantas atau hal hal yang tidak pantas dilakukan akan membentuk cara pandang, sikap hidup yang dapat dipegang teguh. Terbentuknya sistem nilai itu.”⁴⁰

Selanjutnya penerimaan diri ialah suatu kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri.⁴¹ Chaplin J.P mengemukakan sebagai berikut:

“Penerimaan diri adalah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri, serta pengetahuan-pengetahuan akan keterbatasan-keterbatasan sendiri. Penerimaan diri ini mengandaikan adanya kemampuan diri dalam psikologis seseorang, yang menunjukkan kualitas diri.”⁴²

⁴⁰ Haryanti Bahar, “Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)”, hal. 18. Diakses melalui <https://ojs.unm.ac.id> pada tanggal 11 Januari 2022.

⁴¹ Dario Agoes, *Psikologi Perkembangan Anak usia Tiga Tahun Pertama*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 205.

⁴² Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2005), hal. 250.

Dikaitkan dengan kebijakan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh, maka faktor internal seseorang sangat mempengaruhi sikap masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

2.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* dalam Kamus Politik diartikan dengan “rangkaiannya konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.”⁴³

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin Priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.⁴⁴

Koontz, Donnell dan Wehrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.⁴⁵

Kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindakan lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan

⁴³ Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 27.

⁴⁴ Amin Priatna, (Disertasi), “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia”, Pasca Sarjana UNJ, Tahun 2008, hal. 15.

⁴⁵ Harold Koontz, Cyril O’Donnell, dan Heinz Wehrich, *Management Eighth Edition*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1992), hal. 144.

kebijakan substantif.⁴⁶ Kebijakan-kebijakan tersebut secara umum ditujukan dan berpengaruh langsung kepada masyarakat. Setiap keputusan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat disebut kebijakan publik. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. David Easton dalam *A Systems Analysis of Political Life* (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.⁴⁷

Jadi yang dimaksud kebijakan publik dalam penelitian ini adalah keputusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal vaksinasi bagi masyarakat.

2.2.3 Kebijakan Vaksin

Vaksin menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.

Vaksin menurut Ahmadi dalam Lienda Wati adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada

⁴⁶ Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003), hal. 90.

⁴⁷ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.⁴⁸

Kebijakan vaksinasi yang diputuskan oleh pemerintah secara umum untuk menyelamatkan warga Indonesia. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa kebijakan vaksin bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau *herd immunity*.⁴⁹ *Herd immunity* adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut.⁵⁰

Jadi yang dimaksud kebijakan vaksin dalam penelitian ini adalah keputusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemberian antigen berupa mikroorganisme kepada masyarakat menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.

2.2.4 Pemerintah

Pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.⁵¹ Menurut Miriam Budiarmo pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan

⁴⁸ Lienda Wati, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi pada Anak usia 12-23 Tahun di Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2007", *Jurnal FKM Universitas Indonesia*, Tahun 2009, hal. 6.

⁴⁹ <https://covid19.go.id/p/vaksin/tujuan-program-vaksinasi-tercapainya-herd-immunity>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

⁵⁰ <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/apa-itu-herd-immunity-kekebalan-kelompok>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

⁵¹ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), hal. 46.

kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.⁵²

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.⁵³ Selanjutnya menurut David Apter mendefinisikan pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁵⁴

Pemerintah berjenjang, mulai tertinggi presiden atau kepala negara hingga terendah kepala desa. Jadi yang dimaksud pemerintah dalam penelitian ini adalah pihak/organ tertentu yang diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan atau berbuat/bertindak untuk sesuatu yang dianggap memberikan kebaikan kepada masyarakat. Pemerintah secara khusus dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Banda Aceh.

⁵² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 21.

⁵³ Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 6.

⁵⁴ Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hal. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁵⁵ Dapat juga didefinisikan sebuah cara atau langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu data atau kebenaran yang dilakukan secara sistematis berdasarkan logika dan fakta.

Dalam upaya untuk mencapai langkah-langkah sistematis tersebut dalam sebuah penelitian maka dibutuhkan penempatan metode yang sesuai. Hal ini guna untuk mempermudah jalannya penelitian agar berjalan secara sistematis untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian.⁵⁶ Sugiyono mengemukakan bahwa pengertian metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁵⁷ Secara singkat dapat dijelaskan bahwa metode penelitian adalah cara mendapatkan jawaban atau pengetahuan secara ilmiah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini dapat kita lakukan dengan cara melibatkan diri dalam masyarakat ataupun dengan melihat atau mengamati

⁵⁵ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018, hal. 7.

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993), hal. 124.

⁵⁷ Sugiyono, *Op.Cit.*, hal. 3.

fenonema-fenomena yang telah ada dalam masyarakat itu sendiri atau terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menurut Erickson, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁵⁸

Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (*what*)”, “bagaimana (*how*)”, atau “mengapa (*why*)” atas suatu fenomena.⁵⁹ McCusker, K., & Gunaydin, S. menambahkan bahwa pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu.⁶⁰ Isu dalam penelitian ini adalah mengenai vaksinasi yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini.

Maka berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan dua pertanyaan, yaitu dengan menggunakan “bagaimana” untuk pertanyaan pertama dan “apa” untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan konsep dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang akan diteliti, di mana penelitian dilakukan dengan elemen-elemen penting dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di 4 kecamatan di wilayah hukum Kota Banda Aceh meliputi: Syiah Kuala, Meuraksa, Kuta Alam, dan Bandaraya.

⁵⁸ Albi anggito, *Op.Cit.*, hal. 7.

⁵⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

⁶⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama (sumber utama) oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi. Menurut Sugiyono data atau sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶¹ Menurut Suharsimi Arikunto pengertian data primer adalah “data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain”.⁶² Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarakan melalui internet. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan dan primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksin di Kota Banda Aceh. Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.⁶³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, jurnal-jurnal terkait tentang penelitian ini.

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 139.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 172.

⁶³ Sugiyono, *Op.Cit.*, hal. 141.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek atau untuk mengungkapkan kebenaran tertentu dibutuhkan beberapa teknik dalam rangka pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi ke dalam dua bagian, yaitu berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Menurut V. Wiratna Sujarweni, teknik pengumpulan data primer merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menarik informasi kuantitatif.⁶⁴ Sedangkan menurut Hendri Tanjung cara pengumpulan data sekunder yaitu untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi melalui media cetak atau media elektronik.⁶⁵ Teknik-teknik tersebut meliputi:

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan sedangkan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (*interview*). Wawancara atau *interview* dapat diartikan sebagai tanya jawab antara kedua belah pihak atau lebih yang dilakukan secara lisan dan secara langsung.⁶⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa masyarakat yang telah divaksin dan yang belum divaksin yang berada di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti sebagai *interviewer* dengan responden yang

⁶⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.*, hal. 74.

⁶⁵ Hendri Tanjung, *Op.Cit.*, hal. 115.

⁶⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 57-58.

menjadi objek pemberi informasi yang dibutuhkan oleh si peneliti. Responden adalah warga Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang tersebar di sebagian kecamatan (dari Sembilan kecamatan) dan merupakan berasal dari berbagai profesi serta memiliki pendidikan di atas Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

3.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti melalui pengamatan langsung di lapangan. Para peneliti mencatat setiap hasil pengamatan terhadap perilaku objek sasaran.

3.4.3 Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal yaitu: “metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 145.

tinggal mentrasfer bahan-bahan tulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.”⁶⁸

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan.⁶⁹

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, di mana data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif atau model sajian terjalin. Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Reduksi data merupakan proses mengeliminasi data-data yang kurang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian lebih terfokus dan memiliki batasan yang jelas. Proses ini akan dilakukan sejak awal penelitian ketika data sudah didapatkan hingga hasil penelitian telah terakumulasi secara total.⁷⁰

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data hasil wawancara dari beberapa sampel, kemudian diproses

⁶⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan sosial*, (Surabaya Usaha Nasional, 2002), hal. 42-43.

⁶⁹ <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-mengenal-lebih-dalam-analisis-data>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

⁷⁰ Edie Purboyo, “Analisis Perilaku pada Pemilihan Wali Kota Makasar 2013”, (*Skripsi*). Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014, hal. 65-66.

melalui rekaman, pencatatan, pengetikan dan kemudian dianalisa. Selanjutnya diambil kesimpulan yang kemudian diperluas dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.⁷¹ Pemeriksaan keabsahan data akan dimulai peneliti dari mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian data yang terkumpul selama proses penelitian tersebut akan dipilih dan dipilah, dan selanjutnya menganalisis data tersebut secara deskriptif dan mendalam.



⁷¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 100.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Profil Kota Banda Aceh

Banda Aceh adalah pusat Ibukota Provinsi Aceh. Sebelum dinamakan Banda Aceh, kota ini bernama Kutaraja. Dari Kutaraja menjadi Banda Aceh dirubah pada tanggal 28 Desember 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Kota Banda Aceh didirikan oleh Sultan Alaidin Johansyah pada hari Jumat tanggal 22 April 1205 M atau 1 Ramadan 601 H.⁷² Nama Kutaraja diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten. Pergantian nama itu dilakukan pada 24 Januari 1874 setelah Belanda berhasil menduduki Istana Kesultanan Aceh. Secara bahasa Kutaraja berarti kota para raja. Pergantian nama itu kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda di Batavia dengan Beslit yang bertanggal 16 Maret 1874. Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 adalah daerah otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada awal pembentukan terdiri atas dua kecamatan yakni Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman dengan luas 11,08 kilometer.⁷³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Banda Aceh, luas wilayah menjadi 61,36 km² yang dibagi ke dalam empat kecamatan, yaitu: Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa, dan Syiah Kuala. Pada

⁷² Aminullah Usman, "Pasar Al Mahirah dan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat", Opini di Harian Serambi Indonesia, Edisi 30 Agustus 2021, hal. 10.

⁷³ Yusuf A-Qardhawiy Al-Asyiy, *The History of Aceh: Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*, (Banda Aceh: Pena, 2020), hal. 64-65.

tahun 2000 sejumlah kecamatan kembali dimekarkan, sesuai Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Kecamatan bertambah lagi menjadi 5 kecamatan sehingga seluruhnya menjadi 9 kecamatan, yaitu Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa, Banda Raya, Jaya Baru, Ulee Kareng, Kutaraja, Lueng Bata, dan Syiah Kuala. Selain sebagai Pusat Pemerintahan Aceh, Banda Aceh yang luasnya 61,36 km² terkenal juga sebagai pusat peradaban (*tamadun*) di Aceh. Pada zaman Kesultanan Aceh, Banda Aceh merupakan Ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M) oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.⁷⁴

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2016 adalah 254 904 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa, laki-laki mencapai 136.372 jiwa, sedangkan perempuan mencapai 128.739 jiwa. Pada tahun 2020 bertambah menjadi 270.321 jiwa. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, jumlah penduduk pada bulan Desember 2021 sebanyak 276.223 jiwa, terdiri 142.406 laki-laki dan 133.817 perempuan. Kecamatan terbanyak penduduk adalah Kuta Alam yaitu 54.853 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kutaraja, berjumlah 14.205 jiwa.⁷⁵ Jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada masa Kesultanan Aceh terutama pada abad ke-17 penduduk Kota Banda Aceh sekitar 50.000 jiwa.⁷⁶

⁷⁴ Yusuf A-Qardhawiy Al-Asyiy, *Ibid.*, hal. 65.

⁷⁵ Data diambil/diberikan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada akhir Desember 2021.

⁷⁶ Sudirman, *Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500-1873*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009), hal. 22. Lihat juga:

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Kecamatan	2021		
	L	P	Total
010 Meuraxa	11.145	9.867	21.012
011 Jaya Baru	14.001	13.102	27.103
012 Banda Raya	12.750	12.669	25.419
020 Baiturrahman	19.978	19.047	39.025
021 Lueng Bata	13.962	13.252	27.214
030 Kuta Alam	28.580	26.273	54.853
031 Kuta Raja	7.615	6.590	14.205
040 Syiah Kuala	20.197	19.329	39.526
041 Ulee Kareng	14.178	13.688	27.866
Banda Aceh	142.406	133.817	276.223

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara geografis terletak di antara 05°16'15" 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan luas wilayah 61,36 km² (61.359 ha). Tinggi rata-rata wilayah Kota Banda Aceh sekitar 0,80 M di atas permukaan laut.⁷⁷

Sejak dimekarkan beberapa kecamatan pada tahun 2000 menjadi 9 kecamatan, di Banda Aceh terdapat 11 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) atau PKM, terdiri dari:

1. Puskesmas Meuraksa;
2. Puskesmas Jaya Baru;
3. Puskesmas Bandaraya;
4. Puskesmas Baiturrahman;
5. Puskesmas Batoh;
6. Puskesmas Kuta Alam;

<https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>, diakses tanggal 26 Agustus 2021 pukul 19.35 wib.

⁷⁷ Yusuf A-Qardhawy Al-Asyi, *Op.Cit.*, hal. 66.

7. Puskesmas Lampulo;
8. Puskesmas Lampaseh Kota;
9. Puskesmas Kopelma Darussalam;
10. Puskesmas Jeulingke; dan
11. Puskesmas Ulee Kareng.⁷⁸

Di Ibukota Provinsi Aceh ini terdapat 11 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum (Rumah Sakit Meuraksa). Jumlah tenaga kesehatan (Nakes) mencapai 847 petugas di rumah Sakit Meuraksa sudah termasuk dokter umum dan dokter spesialis. Dari Sebelas PKM di Kota Banda Aceh kecamatan terdapat hamper 800 nakes yang dirincikan sebagai berikut:

No	Nama PKM	Jumlah nakes
1	PKM Kopelma Darussalam	52
2	PKM Banda Raya	60
3	PKM Jaya Baru	62
4	PKM Meuraxa	57
5	PKM Ulee Kareng	62
6	PKM Baiturrahman	60
7	PKM Batoh	63
8	PKM Jeulingke	49
9	PKM Lampulo	47
10	PKM Lampaseh	51
11	PKM Kuta Alam	52
	Jumlah	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

⁷⁸ <https://dinkes.bandaacehkota.go.id/puskesmas-wilayah-kerja-dinkes-kota-banda-aceh/>, diakses tanggal 26 Agustus 2021 pukul 19.40 wib.

Setiap gampong di Kota Banda Aceh terdapat satu polindes. Selain itu, setiap seminggu sekali, tenaga kesehatan rutin turun ke gampong-gampong memeriksa kesehatan masyarakat termasuk balita.

4.2. Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Kebijakan Vaksinasi

Vaksinasi di Kota Banda Aceh hingga akhir November 2021 menunjukkan angka signifikan, yaitu sudah mencapai 90 persen dari target sebelumnya hanya 70 persen. Data 26 Desember 2021 sudah menunjukkan angka 97,9 persen dan merupakan tertinggi dari 23 kabupaten/kota.⁷⁹ Sementara berdasarkan laporan Satgas Covid 19 Aceh, pada tanggal 30 Desember 2021, masyarakat yang telah melakukan vaksinasi dosis pertama (vaksin pertama) di Ibukota provinsi Aceh tersebut sudah mencapai angka di atas 100 persen (100,66%) atau sebanyak 190.548 jiwa yang telah mengikuti vaksin. Sedangkan dosis kedua sudah mencapai 71,66 persen atau 136.358 jiwa.⁸⁰

Antusias masyarakat mengikuti program pemerintah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tersebarnya video dan gambar para ulama kharismatik yang mengajak masyarakat agar tidak takut divaksin. Alasan lain karena masyarakat takut bila tidak divaksin tidak bebas bergerak ke mana-mana dan terakhir karena khawatir tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan menyulitkan mereka berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah, seperti mengurus surat menyurat di kepolisian, dan lain-lain.

“Saya membaca pergerakan vaksinasi selama ini di Banda Aceh bergerak sangat cepat terutama setelah adanya himbauan dari beberapa ulama sepuh. Ini faktor besar kenapa masyarakat bersedia divaksin dari sebelumnya banyak

⁷⁹ Harian serambi Indonesia, Edisi 27 Desember 2021, hal. 13.

⁸⁰ Harian Serambi Indonesia, Edisi Jumat 31 Desember 2021, hal. 3.

yang tidak mau. Semakin masifnya masyarakat melakukan vaksin juga karena mereka takut susah berhubungan dengan kantor-kantor pemerintah, ke kantor polisi, dan sebagainya. Ada juga yang takut tidak mendapatkan bantuan, termasuk adik kandung saya yang melakukan vaksin karena takut tidak mendapatkan bantuan bulanan dari pemerintah.”⁸¹

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Hanif menyebutkan, terus melonjaknya antusias masyarakat melakukan program vaksinasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁸²

1. Kerja keras TNI/Polri mendorong masyarakat agar melakukan vaksinasi;
2. Kerja keras Pemerintah kabupaten/kota melakukan vaksinasi massal;
3. Pemberian bantuan dan hadiah dalam berbagai jenis dan bentuk.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif menjelaskan, “kenaikan ini berkat kerja keras polisi bekerja sama dengan TNI dan Pemkab/Pemko yang terus melakukan vaksinasi massal gratis, bahkan diberikan berbagai jenis bantuan dan hadiah kepada peserta vaksin.”⁸³

Dalam melakukan penelitian ini terutama untuk mencari responden sangat sulit karena tidak bersedia dilakukan wawancara dengan berbagai alasan dan pertimbangan, antara lain karena phobia berhadapan dengan hukum atau dianggap tidak mendukung program pemerintah. Kesulitan lain adalah mencari responden yang anti vaksinasi sebagaimana dibagi dalam tiga kelompok masyarakat berdasarkan penelitian ini, yaitu kelompok yang pro, anti, dan abu-abu. Demikian halnya juga bagi kelompok masyarakat yang pro vaksin, mereka juga khawatir dianggap sebagai kelompok corong pemerintah yang mendapatkan honorarium dan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, warga Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh pada tanggal 17 November 2021.

⁸² Harians Serambi Indonesia, Edisi 27 Desember 2021, hal. 13.

⁸³ Harians Serambi Indonesia, Edisi 27 Desember 2021, hal. 13.

harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan apabila terjadi hal-hal di luar yang diharapkan.

Menyikapi kebijakan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh terdapat persepsi masyarakat yang dibagi ke dalam tiga kelompok besar sebagai berikut:

4.2.1. Kelompok pro-Vaksin

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap para responden, sebenarnya masyarakat yang pro vaksin dapat dihitung yang tidak begitu besar jumlahnya. Kelompok ini menyatakan bahwa vaksinasi tidak berbahaya bagi kesehatan dan bagi masyarakat. Persepsi ini lebih banyak muncul dari kalangan militer (TNI-Polri) dan tenaga kesehatan yang memiliki ikatan dinas dengan pemerintah (ASN). Ada juga sebagian bukan dari kalangan ASN maupun militer yang meyakini vaksinasi adalah bentuk ikhtiar untuk mencegah terjangkanya virus corona atau Covid-19.

Bustamam Usman, warga Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh yang juga Ketua Komisi Fatwa MPU Kota Banda Aceh menyatakan bahwa vaksinasi adalah bentuk ikhtiar dari masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit yang mematikan. Lebih lanjut Ketua Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh mengungkapkan, kebijakan vaksinasi oleh pemerintah perlu didukung karena demi kebaikan masyarakat. Hukumnya akan berbeda apabila dapat memudaratkan bagi orangnya. Jika ia meyakini vaksinasi dapat membawa malapetaka, seperti bertambah parah penyakitnya atau dapat mengakibatkan meninggal dunia, maka vaksinasi haram bagi mereka.

“Apabila diambil kesimpulan vaksin itu dapat berubah kesehatan menjadi baik, itu sangat dinajurkan bagi mereka. Bila dampaknya lebih buruk, maka dapat menjadi haram. Alasan karena sebelum divaksin ia normal, begitu divaksin fatal, seperti mati, stress, lumpuh, dan sebagainya. Dapat mengambil sebuah

hukum harus melihat mafsadah dan masalah. Karena vaksin itu fikih menyangkut praktik-praktik kehidupan masyarakat tidak terlepas daripada fikih, karena fikih itu normatif.”

Bapak Bustamam Usman menambah, vaksinasi adalah suatu ikhtiar untuk mencegah penyakit sesuai kaedah fikih, “*dar’uul mafasid muqaddam ‘ala jarbil mashalih*” (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada membawa kebaikan). Salah satu upaya mencegah penyakit yang fatal seperti virus korona adalah melakukan vaksin dan sebagainya.⁸⁴

Secara tegas disampaikan bahwa vaksinasi harus dilakukan oleh masyarakat berdasarkan anjuran pemerintah. Bagi Ketua Komisi Fatwa MPU Kota Banda Aceh, mustahil pemerintah mau menjurumuskan warganya kepada hal-hal yang tidak benar apalagi sampai hilang nyawa mereka akibat vaksin. Bagi Penceramah terkenal itu, vaksinasi adalah program terbaik Negara untuk masyarakatnya agar terhindar dari virus yang sangat berbahaya tersebut.

“Tidak mungkin seorang presiden atau Walilota Banda Aceh rela rakyatnya menjadi korban kalau vaksinasi itu berbahaya. Wakil Presiden juga seorang ulama yang sangat mendukung vaksinasi, bahkan beliau sendiri juga sudah divaksin yang ditayang secara langsung di TV.”⁸⁵

Berdasarkan penjelasan Bapak Bustamam Usman dapat disimpulkan bahwa kebijakan vaksinasi di Kota Banda Aceh adalah bentuk ikhtiar untuk mencegah merebak dan menjangkitnya virus corona bagi masyarakat yang merupakan program masalah bagi umat yang harus didukung oleh semua masyarakat Kota Banda Aceh.

Tokoh pemuda lain asal Banda Aceh adalah Ahmady Thantawi dan merupakan alumni STIP Harapan Bangsa Psikologi yang meyakini vaksinasi adalah “obat”

⁸⁴ Wawancara Dengan Bustamam Usman tanggal 19 Desember 2021.

⁸⁵ *Ibid.*

untuk mencegah corona dan menambah imun tubuh. Pemuda ini telah melakukan vaksinasi pada bulan Agustus 2021. Ia memiliki alasan tersendiri bersedia divaksin karena baginya vaksin itu untuk mencegah korona dan menambah imun tubuh. Ia menegaskan:

“Perlu vaksin karena vaksin mencegah corona, menambah imun tubuh, kita sering kontak dengan orang lain. Ada juga yang meninggal dunia karena ada penyakit dalam tubuhnya vaksin itu dapat meningkatkan imun tubuh kita.”⁸⁶

Persepsi Ahmady Thantawi di atas selaras apa yang dikemukakan oleh Taufik Suprianto, sebagai berikut:⁸⁷

“Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik berupa virus maupun bakteri. Oleh karenanya vaksin berperan sebagai pelindung tubuh karena sistem kekebalan akan menyerang, memproduksi antibodi, serta mengingat suatu bakteri atau virus ketika muncul di kemudian hari. Vaksin bukan hanya bekerja pada diri masing-masing orang saja, tetapi juga mampu melindungi masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi ketika banyak orang sudah melakukan vaksinasi sehingga peluang untuk terjangkit penyakit akan menjadi rendah.”

Ungkapan yang sama disampaikan oleh Prawira Yudha, alumni Fakultas Hukum USK, Banda Aceh yang juga warga Lamseupeng, Kecamatan Luengbata Kota Banda Aceh bahwa baginya vaksinasi adalah program pemerintah yang cukup baik bagi masyarakat. Ia beralasan karena vaksinasi adalah sebagai pelindung diri dari virus corona. Program ini dapat membantu masyarakat terutama warga Aceh agar terjaga kesehatan mereka. Vaksinasi juga dapat meminimalisir masyarakat terkena virus korona.

“Sesuai dengan data-data dari Kementerian Kesehatan, program vaksinasi sangat membantu masyarakat Aceh dalam hal kesehatan sehingga gejala-gejala besar yang di alami setelah terkena covid akan lebih minim. Mengenai

⁸⁶ Wawancara dengan Ahmadi Thantawi pada tanggal 4 Januari 2022.

⁸⁷ Taufik Suprianto, “Sanksi Menolak Vaksin: Bagaimana Sanksi Hukum Menolak Vaksin COVID-19 di Indonesia?”, diakses melalui: <https://heylawedu.id/blog/sanksi-menolak-vaksin-bagaimana-sanksi-hukum-menolak-vaksin-covid-19-di-indonesia>, pada tanggal 11 Januari 2022.

informasi yang menyebutkan efek negatif akibat vaksin itu Selama petugas kesehatan nya berpengalaman dan mengerti keadaan dan kondisi masyarakat yang mau di vaksin .”⁸⁸

Lebih lanjut alumni mahasiswa USK (Universitas Syiah Kuala) Banda Aceh ini mengemukakan, “Mereka hanya mendapatkan sedikit informasi yang benar dan tidak mencari tahu lebih mengenai kebenaran vaksin”. Terkait masifnya vaksinasi saat ini yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah terutama pada akhir tahun 2021, Prawira Yudha mengemukakan bahwa virus corona adalah musibah global yang bukan hanya terjadi dan dirasakan masyarakat Aceh, tetapi di seluruh dunia. Untuk menghadapi merebaknya virus corona, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan vaksinasi bagi setiap masyarakat agar mereka terlindungi.

“Musibah yang di alami seluruh dunia, sehingga pemerintah memang harus gencar mendorong vaksinasi untuk setiap masyarakat, karena sudah kewajiban negara yang diwakilkan pemerintah untuk melindungi warganya.”⁸⁹

Berdasarkan penjelasan kelompok yang pro vaksinasi dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan bentuk ikhtiar untuk mencegah terjadinya penyakit (virus). Apabila telah divaksin maka akan terbentuk imun bagi masyarakat sehingga segala penyakit akan terhindar. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa program vaksinasi yang dicetus pemerintah untuk mencegah atau menimalisir terjangkitnya virus corona bagi masyarakat.

4.2.2. Kelompok Anti Vaksin

Kelompok kedua adalah yang anti vaksin. Kelompok ini tergolong banyak jumlahnya. Mereka memiliki persepsi tersendiri dalam menyikapi vaksinasi. Mereka anti vaksin memiliki alasan tersendiri kenapa mereka menolak vaksin. Kelompok ini jika dilihat secara objektif sebenarnya tidak ada yang bersedia divaksin, tetapi

⁸⁸ Wawancara dengan Prawira Yudha pada tanggal 3 Januari 2022.

⁸⁹ Wawancara pada tanggal 3 Januari 2022.

mereka memiliki kartu vaksin atau Lindungi Diri. Ini mereka dapatkan dari banyak pihak, dan “diperjualbelikan”. Data mengenai perolehan Kartu Vaksin tidak direkomendasikan oleh responden karena demi keamanan diri.

“Saya berani jamin apabila dilihat secara jujur, hanya sedikit warga Banda Aceh yang divaksin, mereka memiliki Kartu Vaksin karena beli yang dijual oleh pihak-pihak tertentu demi mencapai target. Masyarakat tidak mau mengakuinya karena takut dengan risiko proses hukum.”⁹⁰

Sebenarnya masyarakat yang anti vaksinasi cukup banyak di Kota Banda Aceh, tetapi karena mereka khawatir berhadapan dengan Pihak Berwajib, mereka tidak bersedia diwawancarai, namun ada beberapa yang bersedia dengan ketentuan gambar mereka tidak ditampilkan utuh. Elva Waniza misalnya, mahasiswi semester akhir Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh mengatakan, vaksinasi merupakan program yang tidak jelas karena sejak awal covid melanda negeri ini sampai sekarang tidak ada kebijakan pejabat pemerintah yang konsisten. Penduduk Tibang Kecamatan Syiah Kuala ini menambahkan bahwa banyaknya jatuh korban setelah divaksin sebagai bukti bahwa vaksin bukan solusi terbaik untuk mencegah virus corona. Lebih lanjut ditegaskan, kasus Omicron di berbagai mancanegara yang terkena mereka yang telah divaksin lengkap.

“Saya awalnya percaya covid-19, tapi setelah melihat kebijakan pihak-pihak yang menangani covid ini selalu berubah-ubah. Awalnya katanya covid ini paling berbahaya, virus yang mematikan, nyatanya tidak demikian. Pada awal covid berita di media massa sangat menyeramkan, nyatanya tidak begitu. Awal covid masyarakat dilarang berpergian ke mana-mana, eh malah tenaga kerja asing asal Cina bebas keluar-masuk Indonesia. Menteri Kesehatan bapak Terawan yang objektif malah diganti. Begitu juga dengan kerumunan, kalau ulama atau umat Islam diperketat, tapi mereka di luar kalangan Islam diberikan kelonggaran. Presiden Jokowi sendiri bebas menciptakan kerumunan tidak diproses, giliran ulama kritis seperti Habib Rizieq dipenjara. Saya bingung dengan kebijakan elit di negeri kita ini. Yang anehnya lagi cukup banyak data-

⁹⁰ Wawancara dengan Elva Waniza tanggal 7 Januari 2022.

data korban yang sakit atau meninggal dunia setelah divaksin tidak dipublikasi oleh media.”⁹¹

Perempuan kritis dan hafiz Alquran 30 juz ini menambahkan bahwa kebijakan vaksinasi di Indonesia berbeda dengan di negara lain, yaitu tidak ada pemaksaan bagi masyarakat. Sedangkan di negara Indonesia hal ini terjadi. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas masyarakat, siapa yang mau bertanggung jawab, termasuk kematian. Ia menyarankan agar pemerintah objektif dan tidak memaksa masyarakat untuk divaksin karena dinilai melanggar dengan hak asasi manusia internasional.

“Kalau mau objektif kita harus juga mendengar informasi dari dokter-dokter ahli bukan hanya yang berasal dari Indonesia, tapi juga dari Negara lain. Saya mengikuti perkembangan masalah covid-19 dan vaksin di berbagai Negara. Penanganan dan pendekatannya sungguh berbeda. Di luar negeri tidak ada pemaksaan masyarakat untuk divaksin, Negara kita, setelah dipaksa dan ditakut-takuti, eh ada yang dapat hadiah, bahkan umrah. Ini aneh bagi saya dan patut dicurigai apa kepentingan dibalik ini semua. Kalau vaksin ini bagus untuk obat atau menambah imun atau antibodi, kenapa banyak yang meninggal dan sakit setelah divaksin. Kalau itu jadi obat *alhamdulillah*, tapi kalau sebaliknya nanti masyarakat jadi korban atau kejadian terburuk sebagaimana banyak informasi beredar, *depupulation*, siapa yang bertanggung jawab. Tindakan Negara seperti ini menurut saya sungguh melanggar ketentuan hukum internasional terutama instrumen DUHAM dan *International Covenant Civil and Political Rights*. Baca aturan internasional ini.”⁹²

Lebih lanjut ditegaskan, “Apabila Anda tidak percaya dengan korban jatuh setelah divaksin, buka data di media massa yang masih objektif.” Berdasarkan arahan responden, peneliti mencoba mencari data korban meninggal dunia setelah divaksin, faktanya memang ada yang meninggal dunia setelah divaksin.

“Tiga pelajar sekolah dasar (SD) di Jawa Timur meninggal usai mendapat vaksin COVID-19 dosis pertama. Dua kasus siswa meninggal terjadi di

⁹¹ Wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

⁹² *Ibid.*

Jombang dan satu siswa di Magetan. Kasus pertama terjadi di Jombang. Siswa kelas 6 SDN Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang meninggal dunia. Sebelumnya siswa tersebut mendapat vaksinasi dosis pertama jenis Pfizer. Sebelum meninggal, bocah berusia 12 tahun itu sempat demam dan muntah.”⁹³

Media online yang memberitakan mengenai jatuhnya korban setelah divaksin juga dapat dibaca/dilihat dalam kutipan berikut:

“Ada seseorang, setelah menerima vaksin Covid-19, pergi ke Bali, menghadiri acara pesta pernikahan anaknya. Sekembalinya dari acara tersebut, langsung masuk rumah sakit. Tiga hari kemudian, meninggal dunia karena Covid.”⁹⁴

Hal senada dikemukakan oleh Iffah, warga Mibo Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh bahwa program vaksin ini kurang jelas dan aneh. Iffah sebenarnya tidak bersedia divaksin bahkan menganggap vaksin tidak membawa manfaat baginya, tetapi karena terdesak, terpaksa ia lakukan agar mendapatkan kartu vaksin atau Lindungi Diri.

“Saya dari dulu tidak percaya dengan corona. Vaksin ini aneh dan tidak jelas, kalau jelas tidak ada yang meninggal setelah divaksin, tidak ada yang sakit, malah setelah divaksin jadi lain. Kita tidak ada kuasa menolak, ya terima saja, kita berdoa kepada Allah semoga tidak apa-apa ke depan. Menurut saya ini program orang lain yang dipaksakan kepada kita terutama umat Islam. Untuk menghindari akrobatik aneh ini, ya harus cari cara lain agar yang penting ada Kartu Vaksin selama tidak berdosa di mata Tuhan”⁹⁵

Mahasiswa semester VI UIN Ar-Raniry ini menegaskan bahwa seharusnya vaksinasi tidak dipaksakan kepada masyarakat karena dinilai bertentangan dengan HAM. Lebih lanjut diuraikan bahwa vaksinasi tidak menjamin orang akan sehat dan

⁹³ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5883689/dalam-sepekan-3-pelajar-sd-di-jatim-meninggal-usai-divaksin-covid-19>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022.

⁹⁴ <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4607706/cek-fakta-setelah-divaksin-lebih-mudah-terinfeksi-virus-mengakibatkan-kematian-korban-covid-19-bertambah-simak-faktanya>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022.

⁹⁵ Wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

terhindar dari berbagai penyakit dan virus karena banyak kasus saat ini yang terkena corona dan Omicron mereka yang telah divaksin.

“Pemaksaan vaksinasi melanggar HAM dan tidak ada jaminan tidak akan kena setelah divaksin, faktanya justru yang divaksin lengkap banyak dari mereka yang kena virus corona dan virus Omicron yang katanya dari Inggris.”⁹⁶
Persepsi yang senada diutarakan oleh Ibu Ainun binti Syarif Idris warga Punge

Blangcut Kecamatan Meuraksa Banda Aceh bahwa bagi ibu empat anak ini program vaksinasi merupakan program yang merugikan masyarakat.

“Vaksinasi menurut saya program abal-abal dan merugikan masyarakat banyak. Banyak masyarakat meninggal setelah divaksin terkesan disembunyikan oleh pemerintah. Tidak ada manfaat vaksin bagi masyarakat.”⁹⁷
Ibu empat anak ini menambahkan, “Saya kalau tidak dipaksa tidak mau divaksin, walau habis divaksin saya minum air kepala muda dan rempah-rempah yang dapat membersihkan racun akibat divaksin. Abang kandung saya bilang setelah divaksin ia langsung pakai cara atau petunjuk indatu agar cairan vaksinnnya hilang, ya saya lakukan. Tukang bekam bilang darah setelah divaksin yang keluar setelah dibekam seperti darah beracun. Ini jelas kan vaksin itu ada racun yang berbahaya.”⁹⁸

Berdasarkan keterangan dari ketiga warga Banda Aceh yang anti vaksinasi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan vaksinasi oleh pemerintah di Kota Banda Aceh tidak membawa manfaat bagi masyarakat, bahkan dinilai merugikan mereka dan suatu keanehan. Korban jatuh akibat divaksin minus perhatian dari pemerintah. Keanehan lain vaksinasi menurut kelompok anti vaksin ini adalah selain karena pembagian hadiah (*doorsprice*) kepada warga juga terkesan pemaksaan yang dilakukan oleh petugas. Bagi kelompok ini, pemaksaan vaksinasi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, bahkan hukum internasional.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Wawancara pada tanggal 10 Januari 2022.

⁹⁸ *Ibid.*

4.2.3. Kelompok Skeptisme

Kelompok ketiga adalah kelompok skeptisme, yakni yang melihat program vaksinasi secara kritis. Mereka tidak mudah mempercayai program vaksin ini. Mereka pada dasarnya sangat anti dengan vaksinasi, tetapi karena kondisi emergensi mereka terpaksa melakukannya meskipun kemudian menggunakan cara lain untuk membersihkan cairan vaksin yang sudah masuk dalam tubuh mereka. Umumnya mereka bersedia divaksin karena kondisi tertentu yang tidak secara vulgar anti atau pro dengan program vaksinasi. Mereka umumnya bersedia divaksin untuk menolak mudarat yaitu demi keperluan administratif. Ada juga yang bersedia divaksin, tetapi menggunakan cara lain agar suntikan vaksin dapat bersih atau keluar dari tubuhnya, salah satunya seperti dilakukan oleh Bapak Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, yaitu dengan cara dibekam dan minum air kelapa.

Devin Muranis, warga Meuraksa Banda Aceh yang juga baru saja menyelesaikan program sarjana (S-1) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengungkapkan bahwa baginya vaksin sebenarnya kurang baik karena alasan terpaksa, maka ia bersedia divaksin. Ia mengatakan:

“Saya udah vaksin bulan Juli lalu. Saya bersedia divaksin karena ada hal yang berkaitan dengan kampus dengan vaksin, jadi saya vaksin itu untuk melengkapi kebutuhan kampus, karena di mana mana yang saya lihat juga vaksin sudah menjadi salah satu syarat untuk dilengkapi dalam keperluan apapun itu. Jadi mau tak mau saya bersedia divaksin. Pendapat saya sendiri mungkin kewajiban vaksin itu ya salah satu mempersulit situasi dan keadaan apa lagi terutama bagi masyarakat, karena setiap ada keperluan tertentu baik itu hal kecil ataupun besar sudah wajib harus ada surat keterangan bahwa sudah vaksin. Sebenarnya dengan kita mengikuti protokol yang sudah dianjurkan juga sudah cukup aman bagi saya, tidak perlu divaksin.”⁹⁹

⁹⁹ Wawancara Dengan Devin pada tanggal 23 Desember 2021.

Alasan lain bersedia divaksin karena keperluan mencari pekerjaan dan bepergian ke luar daerah, “Saya bersedia karena di mana mana untuk mencari kerja juga harus ada surat vaksin jangankan mencari kerja untuk bepergian keluar daerah saja sudah harus ada. Jadi saya mau tak mau harus vaksin demi keperluan tertentu biarpun saya tidak terlalu yakin bahwa vaksinisasi itu efektif.”¹⁰⁰

Menurut tokoh pemuda Banda Aceh yang juga aktivis kampus di UIN Ar-Raniry, Azharun menjelaskan bahwa ia telah melakukan vaksin kedua pada bulan November 2021. Alasan ia melakukan vaksinisasi karena hendak ke Jakarta. Salah satu syarat naik pesawat penumpangnya harus sudah divaksin. Pemuda asal Kampung Keuramat Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh ini menguraikan bahwa vaksin yang ia lakukan ada dasarnya agar memudahkan pergi ke mana saja dan keperluan lain. Ia keberatan divaksin, namun karena terpaksa, maka tidak ada solusi lain kecuali harus divaksin.¹⁰¹

Azharun menyatakan, “Kalau tidak hal yang terlalu penting, saya memang tidak mau divaksin karena ada efeknya juga kekebalan tubuh kita menurun selama tiga hari kalau divaksin.” Aktivis pemuda ini juga menyarankan kepada masyarakat agar tetap divaksin walaupun terpaksa, karena dapat mengurangi angka penyebaran virus corona.¹⁰²

Mantan aktivis Islam Muhammad Yusuf Al-Qardhawy yang juga Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang saat ini berdomisili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala mengemukakan bahwa program vaksinisasi yang dikampanyekan pemerintah harus dilihat dari dua sisi, yaitu

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Wawancara Dengan Muhammad Yusuf dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021.

¹⁰² *Ibid.*

kemaslahatan dan kemudharatan. Kemaslahatan maksudnya memastikan bahwa program ini benar-benar dapat mencegah masyarakat terkena virus corona. Kemaslahatan juga bermakna tidak ada pemaksaan bagi mereka yang tidak bersedia divaksin. Sedangkan kemudharatan dimaknai bahwa masyarakat yang terkena imbas akibat vaksin baik mereka yang meninggal dunia maupun sakit setelah divaksin pemerintah tidak tinggal diam tanpa memberikan perhatian kepada mereka. Jangan sampai korban berikutnya terus berjatuhan. Bagi tokoh yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi swasta ini menyatakan bahwa program vaksinasi jangan sampai menjadi kepentingan pribadi atau kelompok (*interest syahwati*) sebagian kaum oligarki di Indonesia.

“Kita tidak ingin pemerintah tidak objektif dalam menjalankan program vaksinasi ini. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena minus kalkulasi atau *interest syahwati* elit di negeri ini. Pemerintah harus melihat dari dua sisi, kemudharatan dan kemasalahatan atau kemanfaatan. Kemaslahatan adalah vaksinasi benar-benar melindungi masyarakat dari virus corona, sedangkan kemudharatan korban yang jatuh setelah divaksin jangan dibiarkan begitu saja dan ada data konkret mengenai jatuhnya korban.”¹⁰³

Lebih lanjut dikemukakan bahwa program vaksinasi ini harus dilihat dari dua sumber, yaitu sumber pemerintah dan non-pemerintah. Sumber pemerintah adalah setiap informasi mengenai vaksinasi berasal dari data dan informasi resmi pejabat pemerintah atau pihak yang diberikan otoritas resmi untuk menyampaikan informasi seputar vaksin dan virus corona. Sumber non-pemerintah dimaknai bahwa informasi mengenai vaksinasi juga harus didengar dari pihak lain. Pihak lain maksudnya adalah para pakar dalam bidangnya meskipun mereka bukan bagian dari pemerintah atau sedang berdiskusi di lembaga pemerintah.

¹⁰³ *Ibid.*

“Harus dilihat dari dua sisi program vaksin ini, jangan hanya mendengar informasi dari pemerintah saja. Saya tidak setuju hanya di dengar pemerintah saja, banyak sekali pakar virus atau pakar microbiologi di dunia ini yang paham betul mengenai corona dan vaksinasi. Jangan dikit-dikit hoaks setiap informasi bukan dari pemerintah. Ini tidak objektif menurut saya. Kita tidak tahu apa dibalik vaksinasi ini. Siapa yang berani menjamin tidak akan terjadi sesuatu kepada kita nantinya, dua atau sepuluh tahun kemudian. Ada yang mau bertanggung jawab? Saya yakin tidak ada, maka objektivitas vaksinasi ini harus benar-benar dicermati. Saya sudah divaksin sampai dua kali, tapi terpaksa karena akan menyulitkan saya bila ke mana-mana belum divaksin. Apabila diminta memilih sesuai hukum HAM, saya pasti tidak akan bersedia divaksin. Setelah divaksin saya bekam dan minum air kelapa muda juga pra dan pasca.”¹⁰⁴

Mantan Ketua Dewan Pakar Hukum Pidana Polda Aceh ini juga menyatakan, pemerintah harus jujur dan terbuka kepada masyarakat mengenai vaksinasi, yakni objektif dan konsistensi menyampaikan informasi mengenai covid-19 dan program vaksinasi. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila tidak terkesan pemaksaan dan demi urusan administratif, maka ia memilih tidak akan bersedia divaksin. Kendati bersedia divaksin, tetapi ia memilih cara lain untuk mengeluarkan suntikan cairan Sinovak ke dalam tubuhnya dan minum air kelapa muda yang banyak pra dan pasca vaksinasi.

“Pemerintah harus objektif dan transparan dan tentunya konsistensi informasi cukup penting. Awalnya saya tidak mau divaksin karena ada kesan pemaksaan dan demi kepentingan dinas, maka saya dengan sangat-sangat terpaksa divaksin. Tapi saya punya cara lain untuk mengeluarkan cairan vaksin Sinovac dalam tubuh saya, yaitu dengan cara bekam dibekas suntikan dan minum air kelapa dalam jumlah banyak sebelum dan setelah divaksin.”¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga Banda Aceh pada dasarnya tidak bersedia divaksin, karena terpaksa atau kondisi emergensi mereka bersedia divaksin walaupun harus mencari alternatif lain untuk membersihkan suntikan atau minum air kelapa sebelum dan sesudah divaksin.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Kebijakan Vaksinasi

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses penggabungan dan pengorganisasian data-data indera manusia untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari di sekeliling kita termasuk sadar akan diri kita.¹⁰⁶ Persepsi ini berkaitan langsung dengan stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian ia akan masuk ke dalam otak manusia. Pakar Psikologi Amerika Serikat William James mengatakan, persepsi terbentuk atas dasar data-data yang diperoleh oleh manusia dari lingkungan sekitar yang diserap oleh indera manusia dan juga bias terjadi disebabkan oleh memori berdasarkan pengalaman masa lalu.¹⁰⁷

Suatu persepsi biasanya ditandai dengan ciri-ciri umum yang ada. Ciri-ciri umum tersebut seperti modalitas (rangsangan yang diterima sesuai sifat-sifat sensoris inderawi), dimensi ruang (atas, bawah, tinggi, rendah, dan sebagainya), dimensi waktu (mempunyai batas waktu seperti lambat, cepat, muda, tua, dan lain-lain), struktur konteks, yakni objek atau gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya, dan terakhir adalah dunia penuh arti (kecenderungan melakukan pengamatan pada gejala-gejala yang mempunyai makna).¹⁰⁸

Dalam merespons persepsi, biasanya sangat tergantung kepada pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Demikian juga dengan persepsi, terdapat beberapa

¹⁰⁶ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 110.

¹⁰⁷ Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hal. 53.

¹⁰⁸ Abdul Rahman Saleh, *Op.Cit.*, hal. 111-112.

faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Rhenal Kasali menyebutkan, persepsi ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:¹⁰⁹

1. Latar belakang budaya masyarakat;
2. Pengalaman masa lalu;
3. Nilai-nilai yang dianut; dan
4. Berita-berita yang berkembang;

Berbeda dengan Rhenal Kasali, David Krech dan Richard S. Crutchfield mengemukakan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sesuatu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:¹¹⁰

1. Fungsional, yakni faktor yang bersifat personal, seperti kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif.
2. Faktor personal, yaitu terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian.
3. Faktor situasional, misalnya persepsi mengenai seseorang yang pintar menunjukkan ia sebagai kutu buku, dan sebagainya.
4. Faktor struktural, yaitu persepsi yang timbul berasal dari stimulus fisik dan efek-efek saraf yang berasal dari sistem saraf individu.

P. Siagian Sondang mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap fenomena empiris yang terjadi dalam masyarakat, yaitu:¹¹¹

¹⁰⁹ Rhenal Kasali, *Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2006), hal. 21.

¹¹⁰ Yoedo Shambodo, "Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang UGM terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* Vo. 1, No. 2, Agustus 2020, hal. 102-102.

1. Diri yang bersangkutan atau personal. Faktor ini termasuk yang terbanyak terjadi dalam masyarakat karena seseorang apabila melihat atau mendengar sesuatu berusaha memberikan interpretasinya, padahal belum benar.
2. Sasaran persepsi yang mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sasaran ini berpengaruh antara persepsi.
3. Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang artinya bahwa dalam situasi di mana persepsi itu timbul perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh, maka dapat dijelaskan bahwa persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap hal tersebut ada tiga sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu kelompok (masyarakat) yang pro program vaksinasi, kelompok yang anti, dan kelompok yang abu-abu.

Secara umum dapat digambarkan beberapa faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat Kota Banda Aceh mengenai kebijakan vaksinasi dari pemerintah, sebagai berikut:

4.3.1. Latar belakang budaya masyarakat

Budaya adalah sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu.¹¹² Kluckhohn dan Kelly mendefinisikan budaya adalah “Semua rancangan hidup yang tercipta secara

¹¹¹ P. Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 101-105.

¹¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2000), hal. 181.

historis, baik yang eksplisit maupun implisit, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu, sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia”.¹¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa budaya adalah “akal pikiran” manusia untuk melahirkan sesuatu yang dianggap baik dan berguna bagi mereka. Budaya warga Kota Banda Aceh atau umum masyarakat Aceh adalah religius, dan secara khusus warga Kota Banda Aceh yang diwawancarai memiliki latar belakang pendidikan S-3 (kandidat doktor) 2 orang dan keduanya alumni pondok pesantren (dayah), 1 orang ibu rumah tangga dan juga aktivis salah satu partai berbasis nasional, 4 orang mahasiswa semester akhir dari berbagai perguruan tinggi, 2 orang mantan aktivis dan baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana. Dari Sembilan orang yang diwawancarai terdapat tiga orang perempuan. Dari segi pendidikan ke Sembilan responden sudah cukup baik dan mereka memiliki persepsi yang berbeda dalam menyimpulkan kebijakan vaksinasi oleh pemerintah. Berdasarkan pendidikan terhadap responden dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pendidikan yang relatif baik dan tidak melek informasi terkini terutama mengenai program vaksinasi yang dicetus pemerintah.

4.3.2. *Pengalaman masa lalu*

Pengalaman dapat dimaknai sesuatu yang pernah dirasakan atau dialami di masa lalu. Para responden yang ditanyakan belum pernah divaksin sebelumnya. Ini artinya bahwa kesembilan responden belum pernah memiliki pengalaman mengenai sisi negative maupun positif (manfaat) vaksin terutama vaksin anti virus corona, karena virus in baru muncul ke permukaan pada awal tahun 2020.

¹¹³ <https://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

4.3.3. Nilai-nilai yang dianut

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang dianut, dimiliki, diyakini, dan merupakan jati diri seseorang berupa kejujuran (integritas). Dapat juga dimakna sebagai sikap seseorang dalam masyarakat sehari-hari. Dalam menilai persepsi mengenai kebijakan vaksinasi, nilai di sini adalah kejujuran maupun akhlak yang dimiliki oleh para responden. Responden yang diwawancarai diyakini memiliki nilai yang positif dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh teman-teman yang sudah penulis kenal sebelum. Teman-teman tersebut adalah memiliki nilai-nilai yang baik sejauh yang penulis kenal, dan mereka tentu akan merekomendasikan orang-orang yang memiliki nilai yang baik pula. Secara singkat dapat digambarkan bahwa semua responden dalam penelitian akan memberikan informasi yang jujur menurut persepsi mereka masing-masing.

4.3.4. Berita-berita yang berkembang

Pengertian berita menurut Kamus Bahasa Indonesia seperti dikutip dari Kompas.Com adalah “cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang

¹¹⁴ Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 96

hangat.”¹¹⁵ Berita yang berkembang merupakan salah satu referensi yang sering dijadikan oleh masyarakat atau peneliti. Berita-berita tersebut disampaikan oleh media massa, media cetak, media online, televisi, radio, termasuk saat ini melalui youtube, facebook, Instagram, dan lain-lain. Berita mengenai covid dan vaksinasi menyebar dalam masyarakat. Berita-berita tersebut ada yang bersumber dari Negara (pemerintah) maupun di luar pemerintah. Ada juga berita atau informasi tersebut disampaikan oleh pakarnya atau pihak-pihak tertentu yang belum tentu mengetahui secara mendetail kebenaran informasi tersebut.

Respons masyarakat terhadap sesuatu informasi (berita) yang berkembang yang kemudian menjadi persepsi mereka merupakan persepsi terbanyak dalam penelitian ini. Persepsi masyarakat terbentuk oleh berita-berita yang berkembang secara massif di berbagai media. Para responden yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini juga menyampaikan persepsi mereka mengenai vaksinasi lebih banyak mereka kutip (mendengar) dari berbagai sumber berita yang mereka konsumsi sehingga terbentuk kesimpulan persepsi yang berbeda pula. Berita-berita ini berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat sehingga program pemerintah tidak berjalan sesuai agenda kendati secara kuantitas masyarakat yang ikut vaksin melebihi target di Kota Banda Aceh.

Vaksinasi terhadap masyarakat Indonesia merupakan agenda nasional yang diwajibkan bagi seluruh warga negara. Program tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan karena berbagai faktor. Animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi terpengaruh oleh beberapa isu yang belum tentu mengandung kebenaran. Isu-isu

¹¹⁵<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/10/151245469/pengertian-teks-berita?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

tersebut sengaja dihembuskan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melakukan vaksinasi atau meninggalkan (tidak percaya vaksin) vaksinasi.

Menurut Bapak Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, isu yang dihembuskan oleh segelintir orang melalui media massa atau via media *online* sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi atau sebaliknya.

Bapak Muhammad Yusuf Al-Qardhawy mengungkapkan, sebagai berikut:

“Saya berkesimpulan bahwa persepsi masyarakat mengenai vaksinasi karena pengaruh berita-berita media *online* yang menyebutkan akan bahayanya dampak vaksin. Ditambah lagi para agitator adalah ahli-ahli dalam bidang kesehatan termasuk pakar-pakar ternama, seperti dr. Siti Fadilah Supari, mantan menteri kesehatan era SBY. Pakar lain yang terkenal adalah Ichsanuddin Noorsy yang menilai bahwa virus corona dan program vaksin adalah konspirasi global. Pengaruh persepsi lain karena ada negara yang menolak program vaksin, seperti Tanzania, dan lain-lain.”¹¹⁶

Berdasarkan data akhir tahun 2021, masyarakat Banda Aceh yang sudah divaksin tahap pertama melebihi target pemerintah, yakni sudah mencapai 100,66 persen atau sebanyak 190.548 warga. Masyarakat yang melakukan vaksinasi tahap kedua mencapai 71,66 persen atau sekitar 136.358 warga. Angka ini tergolong tertinggi di seluruh Aceh.

Apabila dilihat animo masyarakat yang bersedia divaksin dengan jumlah angka tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum tidak berpengaruh terhadap persepsi masyarakat yang menganggap vaksinasi mengancam jiwa dan kesehatan mereka. Namun angka yang tergolong tinggi itu terwujud karena banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang bersedia divaksin karena terpaksa atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka mau divaksin.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, warga Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh pada tanggal 17 November 2021.

Pasal 13A dan 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) menyebutkan beberapa sanksi administrasi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, sebagai berikut:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
- c. denda.

Selain sanksi administrasi, bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima menolak untuk divaksin dapat diberikan sanksi pidana. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Undang-Undang Wabah Penyakit Menular) menyatakan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat yang menolak kebijakan vaksinasi dari pemerintah dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Sebagian masyarakat yang awalnya tidak bersedia divaksin, setelah mendapatkan informasi akan ada sanksi, ramai-ramai mereka bersedia divaksin walau hal tersebut berat bagi mereka.

Dari beberapa responden yang ditemui langsung (wawancara) terungkap bahwa mereka umumnya bersedia divaksin karena berbagai faktor, antara lain agar memudahkan pengurusan administrasi, mendapatkan bantuan, bahkan pemaksaan dari petugas. Ada juga responden menjawab bahwa apabila harus memilih, mereka dipastikan tidak akan bersedia divaksin.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai bab empat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga persepsi masyarakat Kota Banda Aceh mengenai program vaksinasi, pertama masyarakat yang anti dengan vaksinasi, kedua, yang setuju (pro), dan ketiga skeptisme. Masyarakat yang anti vaksinasi menyampaikan bahwa vaksinasi adalah program yang merugikan masyarakat karena terancam keselamatan (nyawa) dan kesehatan mereka (sakit, dan sebagainya). Kelompok kedua mereka yang setuju dengan vaksinasi. Kelompok ini beralasan bahwa vaksin adalah bentuk ikhtiar untuk mencegah menular virus corona dan membentuk imun tubuh. Sedangkan kelompok skeptisme adalah mereka di satu sisi setuju dengan vaksinasi, tetapi pemerintah harus objektif mengenai data korban dan keampuhan vaksinasi. Kelompok ini juga meminta masyarakat agar tidak juga menafikan informasi mengenai vaksinasi yang dikemukakan oleh para ahlinya yang bukan bagian pemerintah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat ada empat, yaitu latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita-berita yang berkembang. Kebijakan vaksinasi yang ditanggapi tidak seragam oleh masyarakat Kota Banda Aceh disebabkan oleh berita/informasi yang berkembang.

5.2. Saran

1. Disarankan agar pemerintah objektif dan transparan dalam menjalankan kebijakan vaksinasi bagi masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah tidak melanggar hak-hak asasi manusia dalam menjalankan program vaksinasi ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Bagja Waluya, *Sosiologi Menyealimi Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna inves, 2007.
- Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2005.
- Ellen Netting, F, dkk, *Praktek Makro Pekerjaan Sosial*, Bandung: 2001.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Haroid KoontzCyrill O'Donell, dan Heinz Weihrich, *Management Eighth Edition* New York: McGraw-Hill Book Company, 1992..
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Irwanto, dkk, *Psikologi Umum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2000.
- M Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Martira Maddeppungeng, *Panduan Prosedur Vaksinasi*, 2018.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, Bandung: CV. Wacana Prima, 2009.
- Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003.

- Noviansyah, Kristiani, Fatwa Sari Tetra Dewi, tentang “*Persepsi Masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin*”.
- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006.
- P. Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2015.
- Rhenal Kasali, *Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2006.
- Rohadi Abdul Fatah, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2004.
- Syamsuddin, *Diklat Antropolog Budaya*, Banda Aceh, Unsyiah, 1984.
- Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Sudirman, *Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500-1873*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Fiskologi UGM, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumanto, *Psikologi Umum*, Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yusuf A-Qardhawy Al-Asyi, *The History of Aceh: Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*, Banda Aceh: Pena, 2020.

B. Jurnal/skripsi/tesis/dll

- Amin Priatna, “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia”, Pasca Sarjana UNJ, tahun 2008, (*Disertasi*).
- Edie Purboyo, “Analisis Perilaku pada Pemilihan Wali Kota Makasar 2013”, (*Skripsi*). Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014.
- Lienda Wati, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi pada Anak usia 12-23 Tahun di Jawa Barat dan Jawa Tengah tahun 2007”, *Jurnal FKM Universitas Indonesia*, tahun 2009.
- Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020*.
- Mauliddiyah, Ika (2017) “*Analisis Yuridis Sosiologis tentang Pengawasan Peredaran Vaksin Ditinjau dari Peraturan Peredaran Obat dan Vaksin di RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung oleh Dinkes Kabupaten Tulungagung dan BPOM Jawa Timur*”, *Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang*.
- Nur kaera, (2019) *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Masalah Mursalah*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (*Skripsi*).
- Nur Sultan Baitur R, “*Persepsi Remaja terhadap Kekerasan Verbal dalam Acara Ini Talkshow Net.TV di Kelurahan Gunung Kelua RT. 11 Kecamatan Samarinda Ulu*” *Ilmu Komunikasi*. Vol.5 No 3, 2017.
- Rahmat Dahlan, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang*”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1/Juni 2017.
- Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “*Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*”, *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1/Januari 2015.
- Yoedo Shambodo, “*Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang UGM terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV*”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Sei Ilmu Sosial* Vo. 1, No. 2, Agustus 2020.

C. Data Website dan Media Massa

Aminullah Usman, “*Pasar Al Mahirah dan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat*”, Opini di Harian Serambi Indonesia, Edisi 30 Agustus 2021.

Data Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tahun 2021.

Harian serambi Indonesia, Edisi 27 Desember 2021.

Harian Serambi Indonesia, Edisi Jumat 31 Desember 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses pada 14 Juni 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses pada 14 Juni 2021.

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5285492/vaksin-corona-sudah-sampai-di-indonesia-ini-asal-negara-dan-tingkat-keampuhannya>, diakses pada 14 Juni 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses tanggal 13 Juli 2021.

<https://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html>, diakses pada 14 Juni 2021.

<https://www.kompas.com/sains/image/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=1>, diakses tanggal 13 Juli 2021.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5240431/manfaat-vaksin-covid-19-hingga-efek-sampingnya-menurut-ahli-virus>, diakses tanggal 16 Juli 2021.

<https://www.kemkes.go.id/article/view/21022200001/bappenas-gelar-vaksinasi-covid-19-tahap-pertama-bagi-500-pegawai.html>, diakses pada 14 Juni 2021.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5240431/manfaat-vaksin-covid-19-hingga-efek-sampingnya-menurut-ahli-virus>, diakses tanggal 16 Juli 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/2020111121155-37-200990/brasil-setop-uji-vaksin-corona-sinovac-ahli-bukan-hal-aneh>, diakses pada 14 Juni 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses tanggal 17 Juni 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses tanggal 17 Juni 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses tanggal 17 Juni 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/14000-dosis-vaksin-sinovac-tiba-di-aceh-ini-tahapan-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses tanggal 17 Juni 2021.

<https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>.

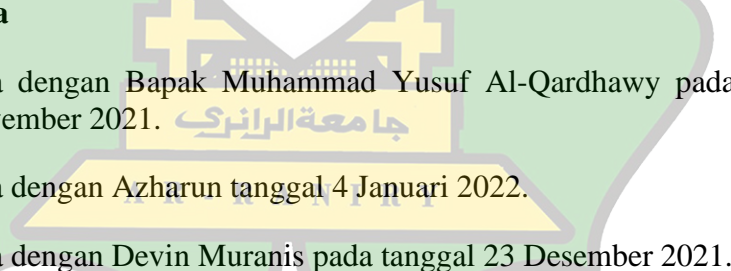
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5883689/dalam-sepekan-3-pelajar-sd-di-jatim-meninggal-usai-divaksin-covid-19>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022.

<https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4607706/cek-fakta-setelah-divaksin-lebih-mudah-terinfeksi-virus-mengakibatkan-kematian-korban-covid-19-bertambah-simak-faktanya>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022.

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012185518/mantan-menkes-siti-fadilah-berita-yang-menakutkan-itu-satu-paket-dengan-virus-repot>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

<https://www.liputan6.com/health/read/4233630/siti-fadilah-supari-ingatkan-ri-tak-perlu-pakai-vaksin-covid-19-bill-gates>

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 17 November 2021. 

Wawancara dengan Azharun tanggal 4 Januari 2022.

Wawancara dengan Devin Muranis pada tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Bustamam Usman pada tanggal 27 Desember 2022.

Wawancara dengan Prawira Yudha pada tanggal 3 Januari 2022.

Wawancara dengan Ibu Ainun binti Syarif Idris pada tanggal 10 Januari 2022.

Wawancara dengan Iffah pada tanggal 7 Januari 2022.

Wawancara dengan Ghaziyya pada tanggal 7 Januari 2022.

Wawancara dengan Ahmadi Thantawi pada tanggal 4 Januari 2022.

Lampiran I

PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN PENELITIAN

I. Masyarakat Pro-Vaksin

1. Apakah bapak/ibu sudah divaksin?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu divaksin?
3. Kapan bapak/ibu divaksin?
4. Apa pendapat bapak/ibu dengan vaksinasi?
5. Sejauhmana bapak/ibu yakin bahwa vaksin itu baik bagi kesehatan kita?
6. Apa indikatornya bahwa vaksin itu baik bagi kesehatan kita?
7. Apa saran bapak/ibu bagi masyarakat Kota Banda Aceh mengenai vaksinasi?
8. Apa tanggapan bapak/ibu mengenai jatuh korban setelah divaksin?

II. Masyarakat Anti-Vaksin

1. Apakah bapak/ibu sudah divaksin?
2. Apa alasan bapak/ibu tidak mau divaksin?
3. Apa pendapat bapak/ibu dengan vaksinasi?
4. Sejauhmana bapak/ibu yakin bahwa vaksin itu tidak baik bagi kesehatan kita?
5. Apa indikatornya bahwa vaksin itu tidak baik bagi kesehatan kita?
6. Apa saran bapak/ibu bagi masyarakat Kota Banda Aceh mengenai vaksinasi?

III. Masyarakat Skeptisme mengenai Vaksin

1. Apakah bapak/ibu sudah divaksin?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu divaksin?
3. Kapan bapak/ibu divaksin?
4. Kenapa bapak bersedia divaksin? (*pertanyaan bagi bersedia divaksin*)
5. Kenapa bapak tidak bersedia divaksin? (*pertanyaan bagi tdk bersedia divaksin*)
6. Apa pendapat bapak/ibu dengan program vaksinasi?
7. Apa saran bapak/ibu bagi masyarakat Kota Banda Aceh mengenai vaksinasi?
8. Apa tanggapan bapak/ibu mengenai jatuh korban setelah divaksin?

Lampiran 2**GAMBAR WAWANCARA DENGAN RESPONDEN DI KOTA BANDA ACEH**

Wawancara dengan Prawira Yudha pada tanggal 3 Januari 2022.





Wawancara dengan Ahmadi Thantawi pada tanggal 4 Januari 2022.



Wawancara dengan Bapak Bustamam Usman pada tanggal 27 Desember 2021.



Wawancara dengan Azharun pada tanggal 4 Januari 2022.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf pada tanggal 17 November 2021.



Wawancara dengan Devin Muranis pada tanggal 23 Desember 2022.



Wawancara dengan Elva Waniza pada tanggal 7 Januari 2022.



Wawancara dengan Ghazia pada tanggal 7 januari 2022.



Wawancara dengan ibu Ainun binti Syarif Idris pada tanggal 10 Januari 2022.